Jalan Lain Menuju Bang Roma

Muh. Chaidir*



Ngobrol soal emansipasi pekerja dan kreatifitasnya mengembangkan teori praksis, hampir sama dengan mata kuliah tentang kekebalan tubuh manusia. Saat sistem proteksi aktif, tubuh kita sebenarnya mampu memilah apa-apa saja yang bisa lolos masuk dan yang tidak. Sistem imun tubuh manusia sendiri terbentuk dari pelajaran panjang terhadap virus maupun obat-obatan.

Semua manusia, bahkan binatang jalang ataupun lajang, punya kemampuan adaptasi dan perbaikan diri. Tugas kita mengembangkannya dengan berbagai jalan. Menuju Roma, bunyi pepatah lama, terhampar banyak jalan. Ada jalan yang lebih efektif, lebih ringkas, berduri, dan menukik. Ada pula jalan yang sunyi, hujan, penuh becek, dan *nggak* ada ojek!

Bila satu jalan tidak membawa kita pada tujuan awal, berputarlah.

Begitu juga dengan soal emansisapi, eh emansipasi, tadi. Jika partai tidak mampu membawa kelas pekerja dan massa kepada sosialisme, berarti ada yang salah dengan jalan ini. Salah jalur kah, atau salah jurusan.

Dalam sebuah brosur wisata, saya tertawa geli membaca salah satu panduan perjalanan ke Roma, berjudul *Berani Menjadi Pelopor!*. Saya tidak habis pikir, kesadaran buruh untuk berserikat dikerdilkan oleh si pemandu wisata. Katanya partailah satu-satunya jalan menuju Roma. Oh, *sori*, revolusi

Alih-alih menolak kepahlawanan, ini malah menyarankan kepeloporan untuk mendikte kesadaran, yang menurut empu buyutnya, hanya akan berkutat pada kesadaran berserikat dan berkumpul belaka. Benar bahwa kesadaran kelas pekerja dibatasi oleh bangunan hegemoni borjuasi, tapi kepedean rasanya kalau mengklaim partailah yang bisa membawa kesadaran pekerja menjadi revolusioner.

Dalam tulisan itu, juga dikisahkan "sekilas teori tentang kesadaran massa dan partai revolusioner", yang ulasannya sama dari tahun ke tahun. Saya sih sepakat kalau dibilang massa pekerja punya potensi revolusioner tapi sekarang masih 'ekonomis'. Tapi bukan berarti kesadaran kelas para pekerja itu tidak bisa diciptakan sendiri oleh mereka. Apalagi didramatisir bahwa kesadaran pekerja hanya bisa mentok di situ, tidak bisa lagi maju, lalu disimpulkan : massa harus dipelopori! Waduuh, ini meng-identifikasi atau meramal, sih?

Banyak yang percaya bahwa kepeloporan dan kepemimpinan di tengah-tengah massa yang lempem adalah keniscayaan. Venezuela tanpa Chavez pasti akan ngambang, sosialisme Rusia tanpa Lenin akan dimakan oleh loyalis Tsar. Namun pandangan itu berakar dari keyakinan bahwa massa yang terkurung di tengah hegemoni dan lingkaran kerja tidak mempunyai waktu luang menjadi pribadi yang revolusioner. Demikianlah teori kepeloporan menjadi niscaya, yang memberikan pembenaran tentang "manajemen satu orang".

Padahal dalam epos sebuah revolusi, akan kita temukan orang-orang yang secara sukarela menjadi militan di garis depan, memutar otak agar mampu memenangkan pertempuran. Mengapa? Karena mereka paham dan sepakat dengan apa yang diperjuangkan. Sementara manajemen satu orang, sentralisme dan birokratisme adalah ekspresi otoritarian, praktek yang membatasi debat konstruktif, memenggal rantai dialektis, dan tak memberi kesempatan massa untuk mengembangkan diri!

Seyogyanya organisasi revolusioner mestilah tidak buta huruf, tidak buta sejarah, tidak buta teori juga tidak buta hati. Ada baiknya juga belajar dari kisah-kisah patah hati yang menyejukkan di bawah ini.

Seperti kisah tiga orang simpatisan Bolshevik di awal revolusi. Otto Ruhle, Herman Gorter, dan Anton Pannekouk tadinya optimis bahwa Rusia akan menjadi negeri pertama yang mempraktekkan komunisme di abad modern. Setelah waktu berjalan, mereka pun kecewa lantaran Partai Bolshevik menjagal kebebasan dan rakus kekuasaan. Perseteruan tiga orang ini dengan Lenin dan kawan-kawan, membidani lahirnya *council communism*, sebagai alternatif atas Bolshevisme atau Leninisme, dan sederet oposisi menentang sentralisme dan keculasan Bolshevik.

Pada akhirnya Bolshevik memang tidak sedang menuju ke Roma. Helmut Wagner, dalam tesisnya tentang Bolshevisme mencatatnya dengan lirih, bahwa apa yang sedang dibangun di Rusia bukanlah sosialisme, melainkan kapitalisme negara.

Kisah patah hati di atas menandakan ada yang tidak beres. Yang terlintas di kepalaku hanyalah pertanyaan sederhana, mengapa masih banyak yang mempercayai model ini?

Sebelum kisah patah hati tersebut, perlu diketahu, soviet-soviet di Rusia berkembang dan mengantarkan massa pekerja menjadi lebih kolektif dan memberi pelajaran berharga terhadap prinsip-prinsip sosialisme. Mereka berproduksi secara mandiri, bekerjasama dengan kaum tani, dan tidak mengikuti pola pemerintahan transisi.

Bolshevik, dengan seruannya mengenai "hak sebuah bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri" kemudian mendorong perebutan kekuasaan atas nama kelas pekerja. Di sinilah kisah-kisah patah hati tadi mulai berkecambah. Lenin dan Bolshevik menjilat ludahnya sendiri. Gaungan "revolusi tanpa demokrasi seutuhnya, sama dengan bohong" hanya sebuah ungkapan manis di awal hubungan. Setelah Uni Soviet diresmikan, soviet-soviet malah dibungkam, serikat dibuat bisu, dan para pekerja dipaksa berproduksi dan mengikuti intruksi partai. Semua dengan pembenaran untuk "menjaga revolusi" dari perang imperialis dan sisa-sisa tentara putih. Kolektifitas dan emansipasi justru menjauh.

Lalu, mengapa partai diperlukan bila para pekerja bisa membagi pandangan politis, teoritis, dan kesadaran, serta mengembangkan disiplin tanpa hirarki partai?

Mungkin saya alpa dan menghantam-rata semua jenis partai, bahwa ada *loh* partai yang revolusioner! Namun kesimpulan tentang metodanya yang kaku, demokrasinya yang palsu, dan elit-elitnya yang pongah, mengantar saya untuk berhati-hati.

Massa pekerja haruslah bisa memperkuat diri dengan saling berbagi pandangan, kekuatan, teori, dan pengalaman revolusionernya, juga membudayakan disiplin revolusioner dalam diri dan kelompok mereka sendiri, tanpa perlu didikte dari elit-elit pekerja. Inilah kepeloporan, *bukan* pendiktean ala partai, dalam makna menjunjung tinggi kesadaran kelas pekerja sebagai motor perjuangan.

Berkesadaran kelas artinya kita juga bisa mengggambarkan bagaimana prinsip masyarakat tak berkelas, kerja-kerja kolektif yang merata. Bila mendaku diri berkesadaran kelas, mengapa tidak membaginya? Bila kalian bisa 'sadar kelas' mengapa yang lain tidak bisa? *So*, marilah kita mencari arah ke Roma, bergotong-royong menentukan titik kooordinatnya.[]

** anggota Perhimpunan Merdeka*

Bersyarekat!
MEMBANGUN SOSIALISME LIBERTARIAN
Nomor 01 - Mei 2015



Perspektif

Malapetaka Liberalisasi Energi

Awal Januari 2015 lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia akan merujuk pada nilai dolar untuk menentukan harga jual bahan bakar minyak di dalam negeri. Tak lama berselang, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga merilis bahwa mulai tanggal 1 Mei, tarif listrik untuk rumah tangga akan dinaikkan. Dua keputusan strategis ini mencerminkan watak politik energi Indonesia yang tidak berubah: liberal.

Seperti halnya di sektor lain, liberalisasi energi pada dasarnya menyerahkan sektor energi ke mekanisme pasar. Para pemuja pasar bebas mengklaim bahwa liberalisasi energi dapat menciptakan pasar yang kompetitif, yang diklaim akan membawa Indonesia pada pengelolaan energi yang lebih efisien dan menguntungkan. Alih-alih menghadirkan pengelolaan yang efisien dan menguntungkan, liberalisasi energi justru membawa malapetaka bagi masyarakat dan lingkungan di Indonesia.

Sejarah Liberalisasi Energi di Indonesia

Penyesuaian harga BBM dengan mekanisme pasar atau kenaikan tarif listrik bukanlah hal baru, karena ini tidak lain turunan dari Konsensus Washington yang berisi 10 paket penyesuaian struktural. Salah satu butir dari kesepakatan tersebut adalah memastikan agar anggaran negara harus memiliki spirit pasar, dimana segala pengeluaran yang tidak mendorong pertumbuhan ekonomi (seperti subsidi sosial) harus dipangkas.

Liberalisasi energi di Indonesia dapat dilacak sejak era Orde Baru. Pada era *oil boom* itu, semua pengelolaan sektor minyak dan gas misalnya, dimonopoli oleh Pertamina sebagai pengelola migas Indonesia. Meskipun berpatokan pada UU No 44/1960, yang menyatakan bahwa pengelolaan migas dilakukan oleh negara atau perusahaan negara, namun perusahaan-perusahaan multinasional dapat bebas beroperasi di bawah *production sharing contract*. Di



tahun 1967, disahkanlah UU No 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang merupakan titik tolak liberalisasi yang paling penting. Undang-undang tersebut membagi-bagi sumberdaya alam dan tenaga kerja di Indonesia untuk kapitalisme internasional.

Seiring menguatnya neo-liberalisme, regulasi sektor migas dirombak melalui UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Secara mendasar, UU tersebut meliberalisasi sektor migas di bagian hulu dengan memberikan keleluasaan pada perusahaan multinasional, melalui kontrak kerjasama, untuk lebih menguasai ladang minyak dan gas di Indonesia. Tahun 2009 DPR meloloskan UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara yang memberikan kebebasan modal internasional berinvestasi dalam sektor energi.

Malapetaka Liberalisasi Energi

Kelas pekerja dan rakyat miskin adalah pihak yang paling pertama dihantam oleh gelombang liberalisasi energi melalui kenaikan harga misalnya BBM dan tarif dasar listrik.Hal ini terutama dihasilkan dari pemangkasan subsidi sosial. Seperti biasa, kenaikan harga BBM dan listrik akan memicu kenaikan kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan begitu kelas pekerja dan rakyat miskin dipaksa untuk mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk tetap hidup di bawah sistem ekonomi yang jahat ini.

Liberalisasi juga merupakan genderang perang bagi rakyat, terutama mereka yang hidup di wilayah-wilayah yang memiliki potensi eksploitasi. Dengan kebutuhan energi yang semakin besar maka dibutuhkan semakin banyak ruang wilayah dan kekuatan politik untuk mengeksploitasi alam.

Kapitalisme membutuhkan ruang untuk melakukan akumulasi kapital tahap pertama (akumulasi primitif). Akumulasi primitif dilakukan dengan merampas tanah-tanah rakyat, mengusir dan mencerabut mereka dari tanah garapan, serta melemparnya ke dalam kelas sosial tanpa kepemilikan (proses proletarisasi). Pembukaan ladang-ladang minyak dan gas, kawasan pertambangan, kilang-kilang, dan pembangkit listrik baru berarti membutuhkan ruang-ruang baru.

Masalahnya adalah, pemanfaatan alam tersebut bukanlah sepenuhnya untuk kebutuhan rakyat. Dalam Outlook Energi Indonesia 2014 disebutkan bahwa pengguna terbesar kebutuhan energi adalah sektor industri yang mencapai 34,8%, melampaui sektor rumah tangga yang hanya 30,7%. Ini menunjukkan malapetaka bertubi-tubi, bagaimana tanah dan kehidupan rakyat dijadikan alat untuk memasok kebutuhan usaha dan industri milik orang kaya dan para politisi.

Meninggalkan Solusi Nasionalis

Energi adalah salah satu sektor vital dan strategis dan menguasai hajat kehidupan masyarakat sehari-hari. Aktifitas dan roda perekonomian ditopang oleh ketersediaan energi. Untuk itu, energi harus dikelola di bawah kontrol langsung rakyat.

Rakyat tidak bisa lagi memandang persoalan ini dari kacamata sempit nasionalisme dan teknokratis ala borjuis. Ancaman yang ditimbulkan dari liberalisasi energi bukanlah tergerusnya kedaulatan nasional Indonesia hanya karena perusahaan-perusahaan besar yang bermain dalam bisnis ini berstatus 'asing'. Pandangan ini hanya dihembuskan oleh elit-elit politik yang terancam kepentingan bisnisnya, dan para nasionalis yang ahistoris.

Semenjak lalu lintas perpindahannya sudah menerabas batas-batas bangsa dengan sangat bebas, kapital tidak memiliki kebangsaan. Semenjak setiap perusahaan multi-nasional dapat dimiliki oleh orang-orang dengan kebangsaan berbeda, statusnya tidak bisa lagi diidentikkan dengan sebuah negara atau bangsa tertentu saja. Semenjak Medco Energy dan Bakrie Group sama ekspansifnya dengan Total dan Chevron, perbedaan kapital asing dan kapital domestik sudah tidak relevan.

Ancaman yang sesungguhnya adalah tergerusnya ruang-ruang hidup dan sosial umat manusia dan alam lingkungan di bawah rezim penghisapan (kapitalisme) yang lebih mementingkan profit dari segala-galanya. Ini berarti kita harus melawan kapitalisme dan membangun tatanan baru dimana tidak ada lagi segelintir orang menguasai perangkat produksi dan mayoritas lainnya terpaksa menjual tenaga kerjanya untuk bertahan hidup. Sebuah model sosialis yang modern dan membebaskan.

sementara hasil produksi bisa diakses oleh semua masyarakatnya. Sosialisme libertarian menentang pemuasan ego pribadi mencari keuntungan semata.

Akan tetapi, karena tatanan sosialis tidak begitu saja lepas dari jejak-jejak sistem sosial sebelumnya, maka apa yang harus diubah bukan saja pada tataran formal, melainkan relasi sosial dalam masyarakatnya. Perubahan relasi sosial adalah esensi untuk tidak mengulang sejarah kelam kediktatoran rezim Bolshevik di Rusia. Semua kesepakatan yang terkait pengelolaan ekonomi harus disusun bersama melalui rapat-rapat umum yang berbasis pada demokrasi langsung.

Sosialisme berarti menghapus masyarakat berkelas dan kerja upahan. Kaum sosialis libertarian menginginkan tatanan sosial yang memaksimalkan kapasitas individu, dan berupaya menghilangkan dominasi yang melemahkan kapasitas tersebut. Karenanya kekuasaan ekonomi di tangan segelintir orang dan kendali politik tersentral harus ditentang bersamaan.

Mengapa Sosialisme Libertarian?

Gerakan Kiri di Indonesia banyak dipengaruhi oleh Internasional Kedua dan Ketiga. Perlu diketahui, Internasional Kedua dan Ketiga terutama didominasi oleh ide-ide Leninisme. Dari sisi strategi, tidak banyak hal yang berubah semenjak pembentukan *Indies Social-Democratic Association* (ISDV) di tahun 1914 hingga penumpasan PKI akhir 60-an oleh Orde Baru. Penumpasan tersebut berdampak sangat kuat sehingga menyebabkan kemunduran gerakan Kiri, hingga kemunculannya kembali di akhir 90-an.

Perlu dicatat, bahwa taktik bukanlah sekedar penentuan langkah yang melalui pertimbangan kondisi dan hal lainnya, namun juga mencakup prinsip perjuangan dan tradisi. Kita telah melihat bagaimana taktik mendegradasi tujuan awal perjuangan.

Salah satu contoh mencolok dalam organisasi Kiri adalah praktek yang dalam tradisi Leninis dikenal sebagai sentralisme-demokratik. Organisasi-organisasi Kiri masih juga *kekeuh* dengan prinsip *sendem* dan berusaha untuk menyegarkan diri dengan modifikasi model organisasi yang terkesan demokratis. Tapi demokrasi ini hanyalah kamuflase untuk membungkus sentralisme.

Sentralisme adalah cerminan politik otoritarian. Revolusi-revolusi di masa lampau remuk oleh karakter otoritarian. Kekuatan revolusioner banyak digulung oleh kekuasaan birokratis dan yang berakar dari sentralisme.

Dengan meninjau sejarah revolusioner di masa lalu, kita dituntut harus senantiasa belajar tentang kemenangan maupun kekalahan yang pernah terjadi. Belajar dari kekalahan Komune Paris 1884, dari runtuhnya Revolusi Rusia 1917-1919, dan tentu saja sejarah penghancuran komunis di Indonesia sendiri. Bukankah mengulang kesalahan yang sama adalah hal tindakan konyol?

Inilah mengapa saya mengusulkan sosialisme libertarian. Dari hingar bingar wacana sosialisme dari atas, saya percaya sosialisme diberlakukan oleh semua orang dan untuk semua orang. Kekuasaan politik dan ekonomi bukan sekedar perebutan kekuasaan negara namun mesti melampaui logika kekuasaan yang tertanam di dalamnya. Hanya dengan berdaulat penuh atas penentuan nasib kita sendiri, mengambil-alih dan mengontrol alat produksi, semua itu bisa terwujud.

Bagaimana Organisasi Libertarian Dipraktekkan?

Mayoritas orang, termasuk yang melek wacana sosialis pun, masih memandang bahwa sosialisme libertarian adalah utopis. Asumsi dasarnya lahir dari pembacaan keliru bahwa para sosialis libertarian menolak berorganisasi, sehingga mustahil mewujudkan sebuah gerakan revolusioner terorganisir. Belum lagi anggapan bahwa berorganisasi adalah wujud tidak konsistennya menolak keterpusatan.

Berjuang melalui organisasi libertarian adalah sebuah pilihan realistis untuk menghadapi penindasan dan penghisapan musuh yang semakin solid. Perdebatannya bukanlah pada berorganisasi atau tidak, melainkan organisasi seperti apa yang relevan dengan karakter libertarian.

Kaum sosialis libertarian menghendaki sebuah organisasi yang mencerminkan pembangunan dunia baru dalam kungkungan tatanan sekarang. Organisasi tersebut adalah wadah perjuangan sekaligus wahana pelatihan diri bagi kadernya akan gagasan dan praktek progresif revolusioner. Bagi kaum sosialis libertarian, relasi sosial dalam organisasi merupakan cerminan relasi sosial yang hendak diperluas di masyarakat, yang akan memberdayakan tiap individu, menghapuskan hirarki sosial dan sentralisme kekuasaan.

Bentuk organisasi dalam tradisi libertarian dapat mengambil bentuk bermacam-macam. Dimulai dari affinitas, yakni kelompok kerja swakelola dan otonom, yang terdiri dari beberapa orang untuk mengerjakan aktifitas dan kepentingan spesifik tertentu. Untuk memperluas dan memadukan proses propaganda, agitasi, diskusi dan pembangunan politik libertarian, dibentuklah federasi antar affinitas. Federasi ini dapat berbentuk sebagai federasi sintesis, yakni federasi yang menyatukan semua bentuk dan tendensi kekuatan libertarian; federasi platformis, yang mensyaratkan adanya "kesatuan teoritik dan taktik" dan "tanggung jawab kolektif" dalam sebuah struktur libertarian; atau pun federasi perjuangan kelas, yaitu federasi dari berbagai kelompok libertarian yang menitikberatkan pada perjuangan kelas pekerja.

Meskipun terdapat beberapa perbedaan, semuanya membutuhkan disiplin diri yang rapi dan solid. Bukan model tangan besi ala Leninis (misalnya), melainkan bentuk kontrol-diri yang dibudayakan dalam tubuh organisasi untuk menghindari penyakit "kebebasan individu" yang liberal dalam tubuh gerakan. Arah gerak dalam organisasi dipandu oleh sebuah platform politik, untuk menghindari kekusutan dalam menilai target-target perjuangan.

Salah satu perbedaan paling mendasar dari organisasi sosialis libertarian dengan sosialis otoritarian adalah pada tata cara pengambilan keputusan. Kaum sosialis otoritarian menerapkan sentralisme demokratik-nya, sementara para sosialis libertarian menerapkan demokrasi langsung dan konsensus.

Penutup : Membangun Sosialisme Libertarian

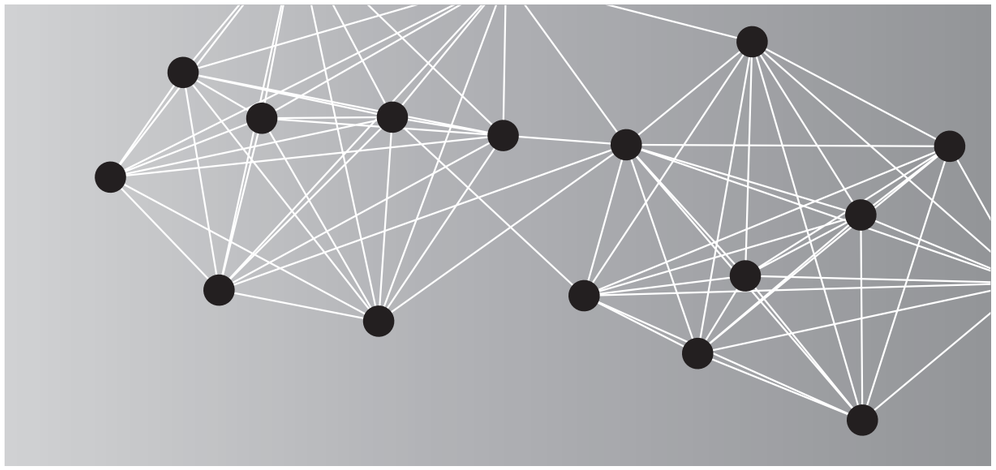
Ide dan wujud sosialisme bukanlah sesuatu yang ahistoris dan utopis, melainkan telah menjadi naluri tiap makhluk untuk bertahan hidup. Peter E Newell dalam "Dari Komunisme Primitif Sampai Komunisme Libertarian", menuliskan bahwa sosialisme bukanlah sesuatu yang jauh dari tubuh kita, melainkan telah ada sejak dulu bahkan menjadi kebutuhan karena krisis kapitalisme.

Untuk membangun sebuah masyarakat sosialis yang libertarian di era modern sekarang, kita harus mengupayakannya sekuat tenaga. Ini hanya bisa ditempuh dengan mengorganisir diri dan menghimpun kekuatan, berbagi kesadaran dan mendorong seluruh kaum resah untuk membangun revolusi. Kita mesti berkumpul dengan mereka![]

** anggota Perhimpunan Merdeka*

Memangkas Sentralisme, Memperluas Federalisme Revolusioner

Moh. Maulana*



Federalisme revolusioner adalah lawan dari sentralisme, yang berbasis pada inisiatif dan kemerdekaan individu atau organisasi anggotanya. Sementara sentralisme justru mengekang kritisisme, inisiatif dan kemerdekaan, dan berpijak pada kepatuhan membabi-buta.

Federalisme revolusioner yang dibahas di sini adalah sebuah rekomendasi praksis untuk mengembangkan gerakan revolusioner yang mampu menuntun ke arah sosialisme.

Praktek Metode Revolusioner

Federalisme sebagai alternatif atas bentuk otoritarian, membuka peluang yang lebih besar untuk prinsip kesetaraan (egalitarianisme), penghapusan hirarki sosial dan kelas, serta distribusi yang lebih merata. Bentuk ini dibangun berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kolektifitas sebagai prinsip mendasar sosialisme. Dengan dasar itulah, federalisme menjadi rekomendasi aktual untuk mengatasi sentralisme yang telah akut.

Sebagai alternatif revolusioner, federalisme mendorong pengembangan asosiasi sukarela di mana semua orang, komunitas atau organisasi berkedudukan setara dalam kendali dan pengambilan keputusan. Dengan begitu federalisme merupakan gambaran masyarakat paska-negara dalam revolusi sosialis. Bentuk ini merupakan antitesa dari kapitalisme dan otoritarianisme, dimana kelompok dan komunitas memegang kendali dalam penentuan hidupnya.

Perlu saya garis bawahi bahwa organisasi revolusioner mempunyai karakter spesifiknya. Agar tidak terjebak dalam jargon politik semata, federalisme haruslah menjadi tumpuan perjuangan untuk sosialisme. Tentu saja dengan melihat sejauh mana praktek federalisme mewujudkan fungsi dan karakter organisasi untuk memperluas otonomi dan partisipasi, membangun kritisisme dan inisiatif dari bawah.

Inilah hakekat dasar federalisme revolusioner sebagai negasi terhadap sentralisme. Untuk itulah tugas organisasi revolusioner memperluas dan mengkonkritkan tatanan sosial yang dituju.

Sentralisme Sebagai Penyakit Akut

Sentralisme adalah virus mematikan yang berfungsi melumpuhkan egalitarianisme dan kreatifitas proletar. Sentralisme pada hakikatnya menunjukkan kecenderungan sebuah organisasi untuk membangun birokrasi baru. Maka gerakan perjuangan sosial yang sentralis layak memperoleh kecurigaan mendasar. Dengan karakter yang sentralistik, segala klaim atas tujuan sosialis adalah kepalsuan. Legitimasinya terhadap negara justru meremajakan negara dan otoritarianismenya. Banyak pejuang sosial yang naif karena gagal memahami logika internal negara. Sebagaimana slogan *"mengadopsi sentralisme adalah taktik dan strategi revolusioner"*, ini sangatlah menggelikan.

Ketidakmampuan memahami watak sentralistik terbukti membuat sejarah revolusi berakhir dengan kegagalan menyedihkan. Revolusi Rusia 1917 adalah contoh lumpuhnya proses emansipasi sosial karena memukul mundur soviet-soviet dan komite-komite pekerja di tempat kerja. Kesalahan lain adalah tidak segera menghapuskan kekuasaan negara. Kaum Bolshevik juga lantas mengeksploitasi kepercayaan kaum buruh dan petani, dan mereorganisasi kembali negara borjuis sesuai dengan keadaan saat itu. Di bawah kontrol negara, Bolshevik mematikan kreatifitas massa revolusioner dengan menghambat perkembangan sistem soviet merdeka dan komite di tingkat tempat kerja yang mewakili sebuah langkah awal ke arah pembangunan sebuah masyarakat tanpa negara.

Rosa Luxemburg, sosialis yang dibunuh oleh rezim Bolshevik, pernah mencatat tentang bahayanya sentralisme. Bagi Luxemburg, sentralisme akan membunuh spontanitas dan insting revolusioner proletariat yang sejati.

Diagnosa lain akan akutnya penyakit sentralisme ialah terbukanya jalan bagi otoritas ilegal. Otoritas ini akan menghancurkan kesetaraan dan harmoni dalam struktur organisasi, begitu sentralisme diaktifkan. Boleh dikata, sentralisme dan kapitalisme adalah dua hal yang berpangkal pada otoritarianisme.

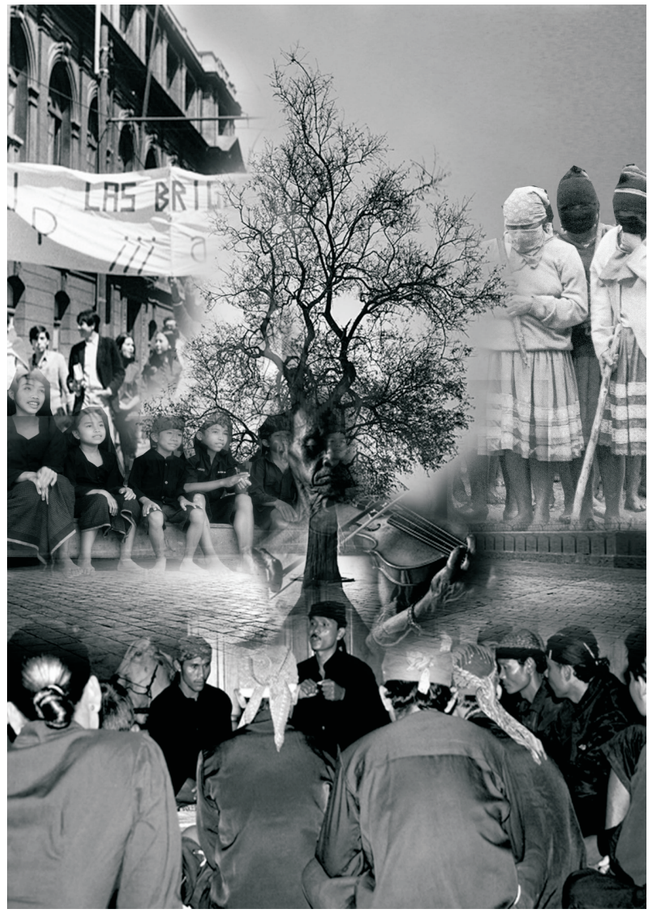
Dengan begitu federalisme revolusioner sebagai komitmen membangun sosialisme yang hakiki, dengan prinsip umum non-birokratis dan desentralisasi, memberi peluang bagi tumbuh kembangnya organisasi pekerja dan organisasi rakyat yang revolusioner.

Praksis Federalisme di Masyarakat

Federalisme revolusioner bertumpu atas tujuan untuk mengembangkan seluruh taktik yang efektif dan mendistribusikan kekuasaan dan kebebasan secara merata. Praksis ini menegaskan bahwa suatu masyarakat sosialis adalah kontrol-proletar terhadap revolusi sosialisnya. Melalui federasi revolusioner, sosialisme dapat diwujudkan dengan menghindarkannya dari retorika kosong yang memanipulasi kediktatoran proletar dengan kepemimpinan borjuasi partai, serta melumpuhkan otonomi organisasi pekerja dan rakyat secara luas.

Contoh penerapan prinsip dan bentuk federalisme revolusioner dapat kita temui dari pengalaman gerakan mahasiswa di Chile. Bastian Fernandez, salah satu aktivis radikal yang terlibat aktif dalam pergerakan mahasiswa Chile, menuturkan bahwa luasnya partisipasi dalam gerakan tidak dapat dipisahkan dari tradisi federalisme yang telah tumbuh di negeri itu sejak dekade 1920-an. Federasi telah efektif sebagai alat bagi gerakan mahasiswa dan gerakan buruh dalam meningkatkan taraf partisipasi dan merangkul partisipan gerakan lebih luas. Federasi mahasiswa, papar Fernandez, adalah "sebentuk pengorganisasian di mana keputusan-keputusan diambil di basis-basis, dan memiliki organisasi yang kompleks dimana federasi-federasi ada dari bawah ke atas."

Contoh lainnya bisa ditilik pada gerakan Zapatista, jaringan global



media independen Indymedia yang mencakup 45 negara, dan masyarakat-masyarakat adat di seluruh dunia. Bentuk-bentuk tersebut memberi gambaran mengenai efektifitas federalisme revolusioner dalam kemasan fleksibel.

Sementara di Nusantara, masyarakat Samin di Jawa zaman kolonial disebut-sebut sebagai contoh penerapan model ini. Dalam bukunya Mohammed, Marx and Marhaen, Jeanne S. Mintz menyebut pemberontakan samin sebagai komunisme natural atau komunisme relijius. Sementara Cipto Mangunkusumo tanpa sungkan melabeli orang Samin sebagai "komunisme utopis".

Orang Samin menolak membayar pajak, tidak menyumbangkan tenaganya untuk negara, melawan peraturan agraria dan menghormati kemerdekaan kolektif dan individu. Gerakannya diorganisir tanpa kepemimpinan sentral, tetapi melalui dewan-dewan adat yang menjangkau Blora, Bojonegoro, Pati, Rembang, Kudus, Madiun, Sragen, dan Grobogan dan yang terbanyak di Tapelan. Perlawanan terhadap pemerintah kolonial ini menunjukan salah satu efektifitas prinsip federasi revolusioner, ketimbang praktek yang sentralistik.

Gambaran-gambaran di atas memberikan pelajaran bahwa keluruhan jiwa membangun masyarakat sosialis di tanah kita adalah menyangkut seberapa fokus kita memenangkan sosialisme. Di tempat kita berpijak, arah taktik dan strategi revolusioner hanya datang dari keinginan eksplorasi dan praksis revolusioner yang meluas. Dalam ikhtiar menggulingkan kapitalisme dan membangun sosialisme, ada banyak peluang yang bisa diraih di sekitar kita. Federalisme revolusioner merupakan salah satu dari yang banyak itu!

** anggota Perhimpunan Merdeka*

Mengusulkan Sosialisme Libertarian
Sebuah Tulisan Pengantar

Titin Jayalangkara*



Tulisan ini mengajukan secara terbuka mengenai ide-ide sosialisme libertarian. Penulis berharap tulisan ini dapat mengantarkan kita pada diskursus yang lebih mendalam tentang sosialisme libertarian. Sebagai tulisan pengantar, disini saya memaparkan denah-denah dari usulan saya.

Apa Itu Sosialisme Libertarian?

Dalam diskusi gerakan sosial, makna *libertarian* kerap dipadankan dengan kebebasan bersaing ala pasar bebas. Bila merujuk penggunaannya pertama kali, pemaknaan tersebut adalah bentuk sesat pikir. Istilah *libertarian* tidaklah lahir dari semangat kompetisi, melainkan kritik atas sentralisasi ekonomi dan politik, untuk mengembalikan semangat gerakan sosial yang keranjingan mengadopsi pola-pola sentralistik kapitalisme dan negara.

Istilah libertarian dalam gerakan radikal diperkenalkan pertama kali di tahun 1858 oleh seorang anarkis berkebangsaan Perancis, Joseph Déjacque, melalui jurnal gerakan sosial *Le Libertaire* di New York. Di tahun 1880 istilah tersebut kemudian diadopsi dalam Kongres Anarkis Perancis, menjadi komunisme libertarian atau sosialisme libertarian. Salah satu alasannya adalah untuk menghindari politik represif anti-anarkis di dataran Eropa saat itu.

Barulah pada tahun 80-an, partai sayap Kanan di Amerika mulai mengadopsi dan mendistorsi istilah libertarian untuk menggambarkan politik *free market capitalism* mereka. Ironisnya, kebanyakan intelektual Kiri di Indonesia juga ikut-ikutan dalam sesat pikir ini.

Sekarang, tepat 157 tahun kemunculan istilah *"libertarian"*, tulisan ini bisa jadi upaya tersendiri untuk mengembalikan akar libertarian pada posisinya. Istilah Kanan dan Kiri tidak relevan membedakan antara yang pro-pasar bebas dan pro-kebebasan sejati. Jika bukan libertarian, maka ia adalah non-libertarian. Sesederhana itu!

Menautkan terma *libertarian* di belakang istilah sosialisme menunjukkan keliyanan sosialisme yang saya maksudkan. Sosialis libertarian menolak gagasan dalam sosialisme otoritarian mengenai kepemilikan dan kontrol negara atas ekonomi, sekaligus menolak negara itu sendiri. Tatanan sosialis berarti *kendali* atas alat produksi sepenuhnya berada langsung di tangan kelas pekerja, bukan negara, bukan pula yang mengatasnamakan kelas pekerja. Dan kendali tersebut haruslah merupakan usaha dari kelas pekerja itu sendiri.

Perihal perbedaan antara sosialis libertarian dengan sosialis otoritarian, anarkis Italia yang dihukum mati pemerintah Amerika Serikat, Vanzetti Bartolomeo, menuliskan hal itu secara ringkas dan tanpa basa-basi, "Kita semua adalah sosialis, begitu juga kaum sosial-demokrat, kaum sosialis, komunis, dan IWW, mereka semua adalah sosialis. Yang membedakan kami dari mereka –dan ini adalah hal mendasar, bahwa mereka otoriter sementara kami libertarian, mereka percaya akan negara atau pemerintahnya, kami tak percaya negara atau pemerintah apapun".

Dalam sosialisme, ekonomi dikelola berdasarkan *"dari tiap orang sesuai kemampuannya, untuk semua orang sesuai kontribusinya"*. Hal tersebut menggambarkan perlawanan terhadap sistem ekonomi sekarang yang berpijak pada akumulasi profit dan eksploitasi kelas pekerja, dan semangat menghilangkan persaingan ekonomi. Sosialisme libertarian mengusulkan tatanan ekonomi dimana alat produksi dimiliki dan dikendalikan pekerjanya,



Munipalisasi Pengelolaan Energi

Sosialisme yang dimaksud disini bukanlah sosialisme yang memuja-muja pertumbuhan, atau bentuk lain dari "soviet plus elektrifikasi" yang liar dan mencampakkan lingkungan. Bukan sosialisme yang memuja-muja teknologi tinggi, yang akan "mengatur ulang sungai-sungai dan pegunungan", melainkan sebuah model yang berpusat pada daya dukung lingkungan. Tidak berguna alam yang kaya, bila tidak bisa dinikmati oleh semua. Tidak berfaedah sumberdaya alam yang dikelola kolektif, namun justru menghancurkan kehidupan.

Kita juga tidak bisa terjebak dalam retorika-retorika sosialis, yang mengindahkan komunitas-komunitas otonom dan memusatkan kekuasaan ke segelintir orang atas nama revolusi. Tidak bisa lagi ada peristiwa seperti di bawah rezim sosialis Chavez di Venezuela dimana masyarakat adat Wayuu, Bari dan Yukpa direpresi demi pembangunan pipa gas milik perusahaan negara dan korporasi internasional.

Tatanan sosialis yang modern haruslah juga membuang segala keburukan tradisi sentralistik dan otoritarianisme ala Bolshevik, melainkan yang bertumpu pada daya dukung lingkungan serta kapasitas maksimal komunitas dalam mengembangkan kehidupan sosialnya.

Menurut Bill McKibben, dalam bukunya Eearth, energi adalah salah satu contoh sektor yang paling bagus dikelola secara terdesentralisir, selain pertanian. Aktivis lingkungan itu mengatakan sangatlah masuk akal untuk memandang sektor energi secara lokal dan regional. Dengan demikian, hal ini mensyaratkan bentuk politik yang desentralistik dan horizontal, yang mesti melampaui privatisasi dalam kapitalisme atau nasionalisasi dalam sosialisme otoritarian.

Alternatif yang bisa ditempuh adalah munipalisasi atau kontrol penuh masyarakat atas ekonomi. Munipalisasi sumberdaya berarti energi (dan juga semua sektor lain dalam kehidupan) harus berada di bawah kendali penuh komunitas yang hidup di atasnya. Salah satu programnya adalah memberikan hak veto kepada masyarakat lokal yang hidup di wilayah pengeboran, tambang atau instalasi, untuk menolak aktifitas eksploitasi alam (sebagaimana yang sukses diperjuangkan oleh gerakan Zapatista melalui Kesepakatan San Andrés dengan Pemerintah Nasional Meksiko).

Munipalisasi juga mesti diikuti dengan merombak relasi sosial dan model politik lalu menggantinya dengan model demokrasi langsung, dan pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan yang sesuai dengan prinsip-prinsip sosial-ekologis.

Ini bukan berarti komunitas lokal akan terisolasi satu sama lainnya, melainkan akan bekerja sama saling menguntungkan dengan komunitas dan kelompok masyarakat lain dalam federasi horizontal. Inilah model sosialisme libertarian, sebuah model sosialisme yang sedang kita perjuangkan!][

Irfan Zaraputra
anggota Perhimpunan Merdeka

Bersyarekat!

Bersyarekat! diterbitkan oleh **Perhimpunan Merdeka**, untuk berbagi sudut pandang dengan pekerja dan masyarakat luas.

Perhimpunan Merdeka berkehendak mengganti kapitalisme dan otoritarianisme dengan masyarakat swakelola yang terdesentralisir.

KONTAK :
www.perhimpunanmerdeka.wordpress.com
Perhimpunan Merdeka
perhimpunan.merdeka@gmail.com

PERHIMPUNAN MERDEKA